

MATERI 4

CELAH KORUPSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Coach Dr. Yanuar Wijayanto, M.T. CT CPEC CCMs CPPP CTNLP CH CHt



1. NAMA :

Dr YANUAR WIJAYANTO, M.T. CPEC CCMs CPPP CT.NLP

PROFESI :

- WIDYAISWARA AHLI MADYA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
- PENYULUH ANTI KORUPSI SERTIFIKASI KPK
- PENGAJAR PENGADAAN BARANG/JASA Level 1,2,3,4 LKPP
- ADVISOR PBJ LKPP
- PROFESSIONAL COACH
- TRAINER BNSP
- TRAINER NEO NLP SOCIETY
- FOUNDER YW INSTITUTE

SOCIAL MEDIA :



WhatsApp

085641250901



Yanuar Wijayanto



yanuarwe



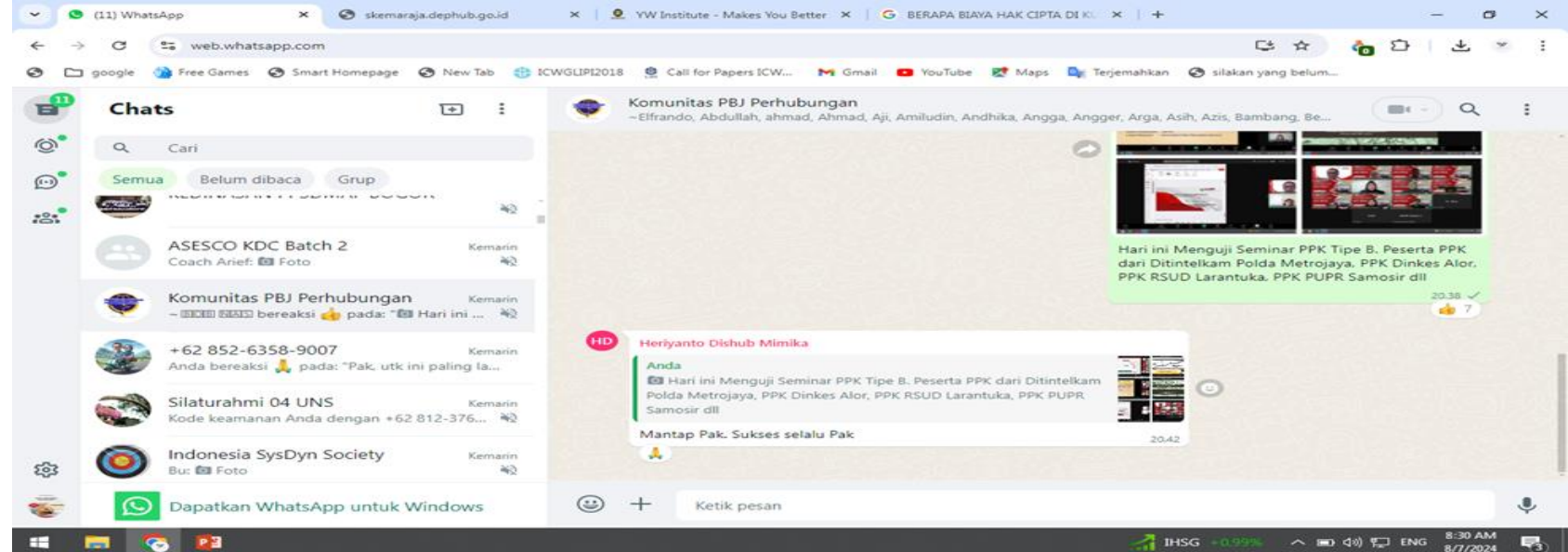
yanuar_we



ywinstitute.com



PELATIHAN ANTI KORUPSI & PENCEGAHAN KORUPSI
DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH



ASTA CITA

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.



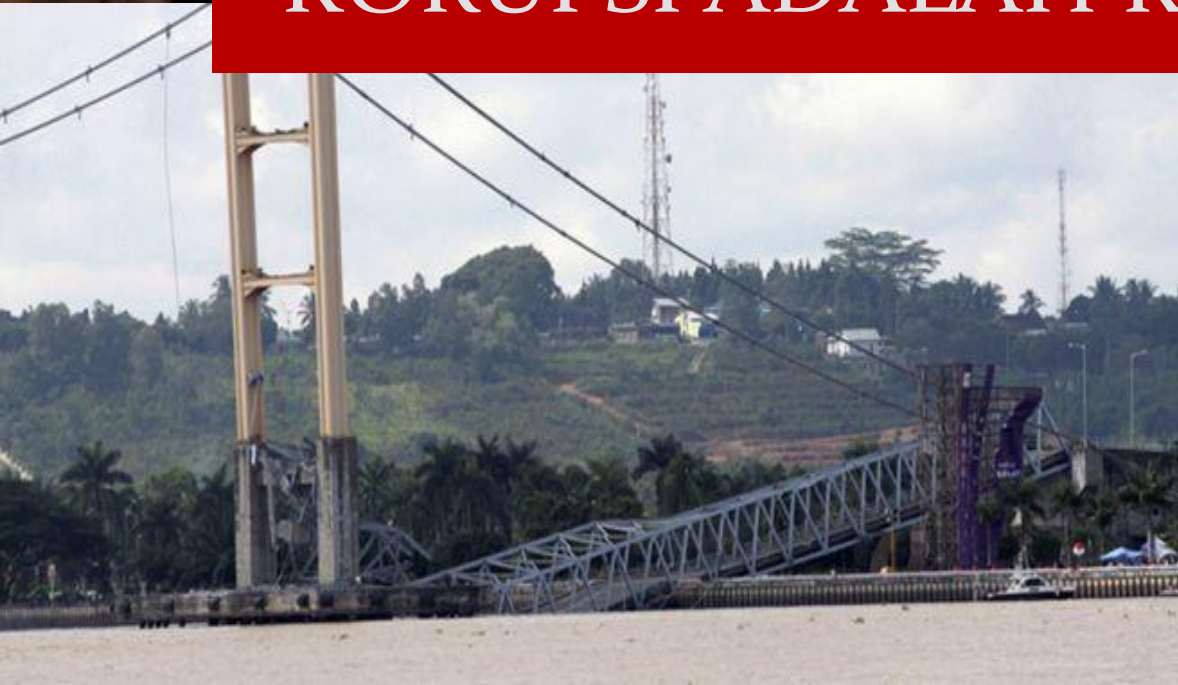
PELUNCURAN PROGRAM PELATIHAN ANTIKORUPSI DAN PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PBJ



Suharti, Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, memberikan pengantar peluncuran pelatihan terbaru dari Puslat SDM PBJ LKPP. Pelatihan terbaru terkait dengan Antikorupsi dan Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa. Dalam sambutan tersebut, Suharti menyampaikan bahwa pelatihan ini sebagai upaya dalam mendukung terwujudnya Asta Cita Presiden Prabowo.



KORUPSI ADALAH KEJAHATAN **LUAR BIASA**



KEJAHATAN LUAR BIASA

1. Berpotensi dilakukan oleh setiap orang.
2. Random target/victim.
3. Kerugiannya besar dan meluas.
4. Terorganisasi atau oleh organisasi.

+ bersifat lintas negara (Korupsi, TPPU, Terorisme, Pelanggaran berat HAM, dan Narkotika)



DAMPAK KORUPSI



KEMISKINAN



KERUSAKAN ALAM



BIAYA EKONOMI TINGGI

CPI INDONESIA 2024



Score

37

99

Rank

Very
Clean

90-100

80-89

70-79

60-69

50-59

40-49

30-39

20-29

10-19

0-9

Highly
Corrupt

No
Data

CPI 2024: ASEAN

Rank	CPI 2024	Country	CPI 2023	
3	84	 Singapore	83	↑
57	50	 Malaysia	50	↔
73	44	 Timor Leste	43	↑
88	40	 Vietnam	41	↓
99	37	 Indonesia	34	↑
107	34	 Thailand	35	↓
114	33	 Laos	28	↑
114	33	 Philippines	34	↓
158	21	 Cambodia	22	↓
168	16	 Myanmar	20	↓

[Kompas.com / News / Nasional](#)

Wakil Ketua KPK: Hampir 90 Persen Perkara Korupsi yang Disidangkan Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Kompas.com - 12/03/2024, 11:28 WIB

**Syakirun Ni'am, Novianti Setuningsih**

Tim Redaksi



KPK Telusuri Aliran Uang Tersangka Korupsi Proyek Jalan di Kalimantan Timur

KPK memeriksa tiga saksi dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Provinsi Kalimantan Timur.

2 November 2024 | 11.45 WIB



Aa



Bagikan



news.detik.com/berita/d-7700846/awang-faroek-tutup-usia-kasus-dihentikan-kpk

Home Berita Jabodetabek Internasional Hukum detikX Kolom Blak blakan Pro Kontra Infografis Foto Video

Adsmart Terpopuler Daerah Hoax or Not Suara Pembaca Hoegeng Awards 2025 Pilkada 2024

detikNews > Berita

Awang Faroek Tutup Usia, Kasus Dihentikan KPK

Tim detikcom - detikNews

Senin, 23 Des 2024 22:08 WIB



Awang Faroek Tutup Usia, Kasus Dihentikan KPK

rrr.co.id/daerah/1178697/kejati-kaltim-berhasil-tangani-puluhan-kasus-korupsi-2024

Pusat Pemberitaan Pilih Daerah

rrr DIGITAL

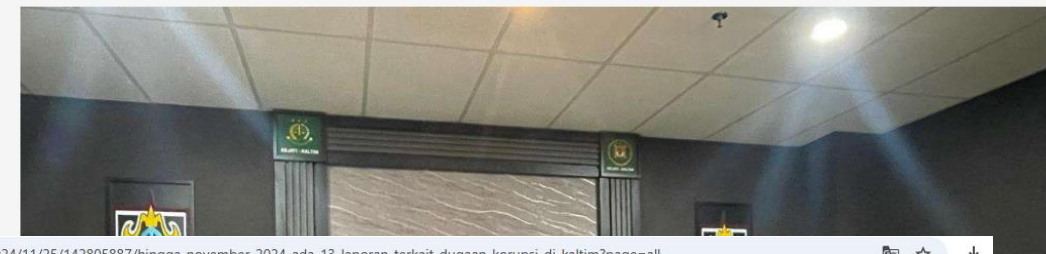
rrr RADIO STREAMING

rrr

Daerah

Kejati Kaltim Berhasil Tangani Puluhan Kasus Korupsi 2024

Oleh: Boy Saputra Editor: Alfian 09 Dec 2024 - 12:58 Samarinda



ikn.kompas.com/read/2024/11/25/142805887/hingga-november-2024-ada-13-laporan-terkait-dugaan-korupsi-di-kaltim?page=all

KOMPAS.com

News

Nusaraya

Tekno

Otomotif

Bola

Lifestyle

Tren

Lestari

Health

Money

Properti

Edukasi

Travel

BAGIKAN:



Hingga November 2024, Ada 13 Laporan Terkait Dugaan Korupsi di Kaltim

KOMENTAR:

Kompas.com / Ikn / News

Hingga November 2024, Ada 13 Laporan Terkait Dugaan Korupsi di Kaltim

Kompas.com - 25/11/2024, 14:28 WIB



Hilda B Alexander

Penulis



Lihat Foto



Berita, Headline, Lokal

Dugaan Praktek Kotor di Pemkab Bangka Mulai dari Proyek Makan Minum Bangka Setara Hingga Jual Beli Jabatan

Oby
Januari 24, 2024

Beranda >

Tak Berkategori

Ratusan ASN di Pemalang Terkena Sanksi Terkait Kasus Beli Jabatan, LSM LI TIPIKOR Dukung Penuh Keputusan Bu

Haluan Indonesia
24 Desember 2023

Homepage / Daerah

Redaksi July 19, 2024 Daerah

Terjadi Lagi Jual Beli Jabatan di Tiga OPD di Kabupaten OKU

Redaksi July 19, 2024 Daerah

knews Berita Jabodetabek Internasional Hukum

Lothadi 'PNS Tajir' Divonis 3,5 Tahun Penjara di Kasus Suap dan TPPU

Zunita Putri - detikNews
Rabu, 14 Jul 2021 16:01 WIB

detiknews Home Berita Jabodetabek Internasional Hukum

30 Tersangka Tes ASN Curang Diduga Terima Suap hingga Rp 600 Juta

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Senin, 25 Apr 2022 12:34 WIB

detiksumbagsel Home Berita Sepakbola Hukum & Kriminal Budaya

Kejati Sumsel Geledah Rumah Tersangka Gratifikasi Oknum PNS Inspektorat

Irawan - detikSumbagsel
Kamis, 18 Jan 2024 20:20 WIB

detiknews Home Berita Jabodetabek Internasional H

KPK Panggil PNS Kemenhub Ja Saksi Kasus Suap Jalur KA

Mulia Budi - detikNews
Jumat, 15 Des 2023 13:25 WIB

ANTARA > Hukum

Hakim nyatakan seorang jaksa terbukti terima gratifikasi seleksi CPNS

6 Oktober 2023 16:37 WIB

Berkas Oknum ASN Inspekt Sumsel Tersangka Suap Dilimpahkan ke Kejari Paler

Irawan - detikSumbagsel
Senin, 12 Feb 2024 21:21 WIB

KASUS DITJEN PAJAK

Dua Pegawai Pajak Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Puluhan Miliar Rupiah

Yulmanizar dan Febrian didakwa menerima suap dan gratifikasi miliaran rupiah dari sejumlah wajib pajak perusahaan.

Audio Berita 7 menit

Oleh NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR
25 Januari 2024 18:09 WIB · 4 menit baca

BPK RI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT

Ada Temuan Perjalanan Dinas Fiktif Rp5,03 Miliar, Bos Bapanas Buka Suara

Ilina 12 2024



medcom.id/nasional/hukum/8koagQRN-ahli-yakinkan-kerugian-negara-mencapai-rp121-m

[Eduverse](#)[Tekno](#)[Entertainment](#)[Lifestyle](#)[News](#)[Hype & Viral](#)[PIALA AFF](#)[Pilkada 2024](#)[Mas](#)[Index](#)[Politik](#) [Peristiwa](#) [Hukum](#) [Metro](#) [Daerah](#)

Sidang Korupsi Simulator SIM

Ahli Yakinkan Kerugian Negara Mencapai Rp121 M

Renatha Swasty • 02 Maret 2015 15:54

A+

A-

medcom.id, Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan total kerugian keuangan negara dalam korupsi pengadaan simulator uji klinik pengemudi roda dua (R2) dan roda empat (R4) tahun anggaran 2011 di



10 Tangkap Tangan di Tahun 2022

1



Rahmat Effendi
Walikota Bekasi
2017-2022

6



Haryadi Suyuti
Walikota Yogyakarta
2017-2022

2



Abdul Gafur Mas'ud
Bupati Penajam Paser Utara
2018-2023

7



Mukti Agung Wibowo
Bupati Pematang
2021-2025

3



Terbit Rencana Perangin Angin
Bupati Kabupaten Langkat
2019-2024

8



Karomani
Rektor Universitas Lampung
2019-2023

4



Itong Isnaini Hidayat
Hakim Pengadilan Negeri Surabaya

9



Sudrajad Dimiyati
Hakim Agung MA
2014 2022

5



Ade Yasin
Bupati Bogor
2018-2023

10



Sahat Tua
Wakil Ketua DPRD Prov. Jawa Timur
2019-2024

Rahmat Effendi
Walikota Bekasi
2017-2022

2/6

**Kasus: Pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan
di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi**
Kegiatan Tangkap Tangan: 6 Januari 2022

Abdul Gafur Mas'ud
Bupati Penajam Paser Utara
2018-2023

**Kasus: Pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Lingkungan
Pemerintah kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan timur
tahun 2021-2022**

Kegiatan Tangkap Tangan: 12 Januari 2022

Terbit Rencana Perangin Angin

Bupati Kabupaten Langkat

2019-2024

3/6



Kasus: Kegiatan pengadaan barang dan jasa tahun 2020 s/d 2022 di Kabupaten Langkat
Kegiatan Tangkap Tangan: 19 Januari 2022

Itong Isnaini Hidayat

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya



Kasus: Pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya
Kegiatan Tangkap Tangan: 20 Januari 2022


Ade Yasin
Bupati Bogor
2018-2023

4/6

**Kasus: Pengurusan laporan keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021**
Kegiatan Tangkap Tangan: 27 April 2022

Haryadi Suyuti
Walikota Yogyakarta
2017-2022

Kasus: Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di wilayah Jogjakarta
Kegiatan Tangkap Tangan: 2 Juni 2022



**Kasus: Pungutan liar pengadaan barang dan jual beli jabatan
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang**
Kegiatan Tangkap Tangan: 11 Agustus 2022



Karomani
Rektor Universitas Lampung
2019-2023

**Kasus: Suap penerimaan mahasiswa baru di lingkungan
Universitas Lampung tahun 2022**
Kegiatan Tangkap Tangan: 19 Agustus 2022



Kasus: Penanganan perkara di lingkungan Mahkamah Agung
Kegiatan Tangkap Tangan: 23 September 2022

Sahat Tua
Wakil Ketua DPRD Prov. Jawa Timur
019-2024



Kasus: Suap pengelolaan dana hibah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Kegiatan Tangkap Tangan: 14 Desember 2022

daerah.sindonews.com/berita/994984/22/korupsi-rp24-m-dosen-poltran-tegal-ditahan?showpage=all

Home Nusantara Sumatera Utara Sumatera Selatan Jabar Jateng & DIY Jatim

Beranda / Daerah / Jawa Tengah

Korupsi Rp2,4 M, Dosen Poltran Tegal Ditahan

Eka Setiawan • Selasa, 28 April 2015 - 19:37 WIB



1 Shares

kumparan.com/hipontianak/ada-aliran-dana-korupsi-bp2td-kalbar-ke-pejabat-kemenhub-untuk-karaoke-dan-pijat

Free Games Smart Homepage New Tab ICWGLIPI2018 Call for Papers ICW... Gmail

HIIPONTIANAK

Cari di sini...

News Entertainment Tekno & Sains Otomotif Food & Travel Bisnis Bola & Spor

Breaking News Green Initiative Halal Living Video Story Audio Story Trending kumparan

Konten Media Partner

Ada Aliran Dana Korupsi BP2TD Kalbar ke Pejabat Kemenhub untuk Karaoke dan Pijat

HiPontianak

14 Maret 2023 16:26 WIB · waktu baca 3 menit

news.detik.com/berita/d-7083359/terbukti-terima-suap-eks-direktur-djka-harno-divonis-5-tahun-penjara

Free Games Smart Homepage New Tab ICWGLIPI2018 Call for Papers ICW... Gmail YouTube

detiknews Home Berita Jabodetabek Internasional Hukum detikX Kolom Blak blakan

detikNews > Berita

Terbukti Terima Suap, Eks Direktur DJKA Harno Divonis 5 Tahun Penjara

Mulia Budi · detikNews

Senin, 11 Des 2023 14:13 WIB



antaranews.com/berita/559679/bobby-mamahit-didakwa-terima-rp576-juta

Free Games Smart Homepage New Tab ICWGLIPI2018 Call for Papers ICW... Gmail YouTube

ANTARA KANTOR BERITA INDONESIA

HOME POLITIK HUKUM EKONOMI METRO SEPAKBO

ANTARA > Hukum > Hukum > Bobby Mamahit didakwa terima Rp576 juta

Bobby Mamahit didakwa terima Rp576 juta

Senin, 9 Mei 2016 14:21 WIB · waktu baca 2 menit



STRATEGI PENCEGAHAN PENYIMPANGAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA (PB/J)

KEJADIAN 13 JANUARI 2016, 28 DESEMBER 2018, DAN 15 OKTOBER 2019



<https://www.liputan6.com/news/read/2612965/puluhan-pegawai-kementerian-pupr-diperiksa-kpk-soal-suap-jalan>

Puluhan Pegawai Kementerian PUPR Diperiksa KPK Soal Suap Jalan

Oscar Ferri
28 Sep 2016, 14:02 WIB

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah pegawai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam kasus dugaan suap jalan di Maluku dan Maluku Utara.

Mereka ramai-ramai diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka Amran HI Mustari, Kepala Balai Pembangunan Jalan Nasional (BPJN) IX.

"Mereka saksi untuk tersangka AHM," ucap Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK saat dikonfirmasi, Rabu (28/9/2016).

<https://www.viva.co.id/berita/nasional/1107634-kpk-duga-suap-proyek-air-minum-di-kementerian-pupr-sistematis>

KPK Duga Suap Proyek Air Minum di Kementerian PUPR Sistematis

Tim VIVA

31 Desember 2018 | 10:46 WIB

"Melihat sebaran dugaan suap terkait proyek air minum ini, dan proyek-proyek lainnya yang juga dipegang oleh WKE (PT Wijaya Kesuma Emindo) dan TSP (PT Tashida Sejahtera Perkasa), kami menduga kasus SPAM di PUPR tersebut terjadi sistematis," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah kepada wartawan, Senin, 31 Desember 2018.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190314103419-12-377138/kasus-spam-kpk-duga-aliran-suap-ke-pejabat-pupr-masif>

Kasus SPAM, KPK Duga Aliran Suap ke Pejabat PUPR Masif

CNN Indonesia | Kamis, 14/03/2019 11:06 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga aliran dana suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) kepada pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terjadi cukup masif. Hal ini diketahui dari banyaknya pengembalian duit terkait proyek itu ke KPK.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan dalam kasus ini setidaknya sudah ada puluhan pejabat Kementerian PUPR yang mengembalikan uang suap, baik dari unsur saksi, maupun tersangka.

2019/10/16 23:54:31 WIB

Kepala BPJN XII Balikpapan Tersangka Suap Ditahan KPK

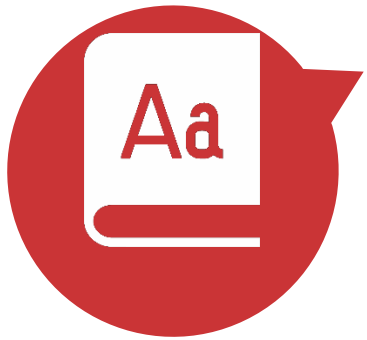
Ibnu Hariyanto - detikNews

0 komentar



-
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi
 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2023 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan
 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2023 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan





SECARA HARFIAH

“Corruptio = Busuk”



YURIDIS

UU No. 31 Thn. 1999 jo. UU No. 20 Thn. 2001

“Setiap orang yang dengan sengaja dengan melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.”

Jenis Tipikor (UU No.31/1999 Jo.UU No.20/2001)

Korupsi dirumuskan dalam 30 jenis tipikor, dikelompokkan menjadi tujuh jenis besar.

1



KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Ps. 2 , Ps. 3
(penyalahgunaan
wewenang)

2



SUAP-MENYUAP

Ps 5(1) a,b; Ps 13; Ps, 5(2); Ps 12 a,b;
Ps 11; Ps 6(1) a,b; Ps 6(2); Ps 12 c,d

KONFLIK KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN

Pasal 12 huruf i

6



3



PENGGELAPAN DALAM JABATAN

Pasal 8; 9; 10 a,b,c

4



PEMERASAN

Pasal 12 huruf e,f,g

5



PERBUATAN CURANG

Ps 7 (1) huruf a,b,c,d; Ps 7 (2); Ps 12 huruf h

7



GRATIFIKASI

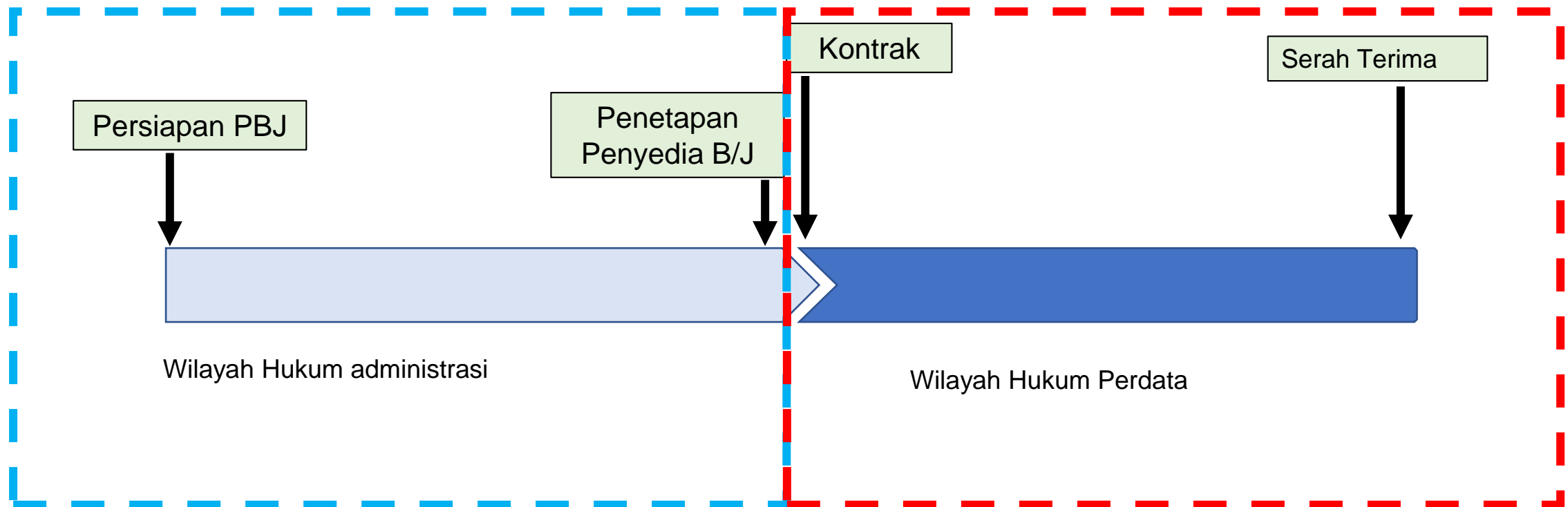
Pasal 12B jo Pasal 12C



TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN KORUPSI

- 1.Merintang proses
- 2.Keterangan kekayaan
- 3.Keterangan rekening
- 4.Keterangan palsu
- 5.Identitas pelapor

Aspek Hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa



Wilayah Hukum Pidana jika ada suap, markup, fiktif, dan kolusi

Wilayah Persaingan Usaha jika persekongkolan atau pengaturan yang menghilangkan persaingan

Tuntutan Kasus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1

**Tindak Pidana
Korupsi**

2

**Tindak Pidana Pencucian
Uang (TPPU)**

3

**Tindak Pidana
Korporasi (TPK)**

**Tindak Pidana
Perpajakan**

4

Perdata

5

Persaingan Usaha

6

CONTOH KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

1

Kerugian Keuangan Negara



Perkara tipikor yang mengakibatkan kerugian keuangan negara pada kegiatan pengadaan dan pemasangan Six Roll Mill di Pabrik Gula Djatiroto PT Perkebunan Nusantara XI selama periode tahun 2015-2016 yang diduga dilakukan oleh Terdakwa BAP (Direktur Produksi PTPN XI)

2

Suap-Menyuap



Direktur Utama PT Bina Karya Raya) memberi hadiah atau janji kepada RHP selaku Bupati Mamberamo Tengah Periode 2013-2018 dan 2018-2023 terkait proyek PBJ di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah

3

Konflik Kepentingan



Penerimaan gratifikasi terkait PBJ di Pemkab Banjarnegara Tahun 2017 – 2018 atas nama Terdakwa BS (Walikota Banjarnegara) dan Terdakwa KA (Wiraswasta).

PENCEGAHAN KORUPSI PBJP

CONTOH KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

4

Gratifikasi



JRK bersama-sama TSS selaku Bupati Buru Selatan Periode 2011- 2016 dan Periode 2016- 2021, dimana yang bersangkutan menerima hadiah atau janji terkait Proyek Pembangunan Jalan Dalam Kota Namrole tahun 2015 di Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dari seseorang bernama IK dan menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya

5

Pemerasan



kasus pemerasan biasanya terjadi secara tidak langsung, misalnya, seorang pegawai negeri menyatakan bahwa tarif pengurusan dokumen perizinan usaha yang menjadi salah satu dokumen utama agar penyedia dapat ikut dalam proses pengadaan adalah Rp50 ribu, padahal seharusnya hanya Rp15 ribu atau malah gratis

6

Penggelapan dalam Jabatan



Misalnya penegak hukum merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap.

PENCEGAHAN KORUPSI PBJP

Analisis Tindak Pidana Korupsi PBJ

TAHAPAN PROSES PBJ

Bagaimana modus korupsi yang dilakukan?



[Contoh kasus inkracht korupsi pengadaan \(Nazarudin dan Angelina Sondakh\) Infografis kasus korupsi](#)

Proses Perencanaan Anggaran

Perencanaan – Persiapan PBJ Pemerintah

Pelaksanaan PBJ Pemerintah

Proses Serah Terima dan Pembayaran

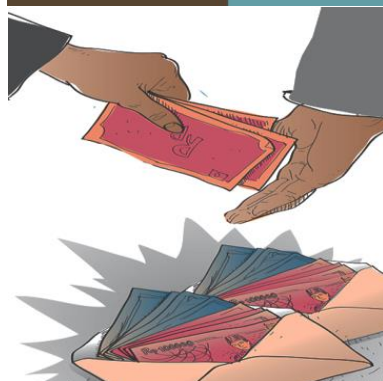
Proses Pengawasan dan Pertanggung-jawaban

- Proyek/Paket sudah dijual terlebih dahulu kepada vendor sebelum anggaran disetujui atau disahkan. Pengadaan tidak sesuai dengan kebutuhan (rekayasa dokumen).
- Persekongkolan antara DPR, pihak K/L (KPA), dan Vendor. Proaktif bisa dilakukan oleh DPR, K/L, atau vendor.
- HPS dan spek teknis dibuat oleh vendor
- *Mark up* harga
- Suap kepada pihak-pihak terkait
- Manipulasi pemilihan pemenang.

Sumber: Dit. Litbang KPK, 2019

- Pengumuman terbatas
- Manipulasi pemilihan pemenang
- Manipulasi dokumen lelang.
- HPS dan spek teknis dibuat oleh vendor
- *Mark up* harga
- Suap kepada pihak-pihak terkait
- Persekongkolan KPA, PPK, Pokja ULP/Pimpro, PPHP, Bendahara.
- Manipulasi dokumen serah terima

- Suap kepada auditor (BPK atau BPKP) untuk menghilangkan temuan audit
- Suap kepada penegak hukum untuk meringankan hukuman



MODUS OPERANDI PENYIMPANGAN PBJP

INTI MASALAH

INDIKASI

???

MARKUP

ADANYA DUGAAN HARGA PASARAN
ATAS BARANG JAUH LEBIH MURAH

18

TAHAP

VOLUME PEKERJAAN KURANG

ADANYA DUGAAN ITEM/KOMPONEN
PEKERJAAN YANG TIDAK SESUAI
SPESIFIKASI TEKNIS DALAM
KONTRAK

30

PENYIMPANGAN TPK

PEKERJAAN FIKTIF

ADANYA DUGAAN DOUBLE
ANGGARAN PAGU ANGGARAN DAN
WAKTU PELAKSANAAN YANG TIDAK
REALISTIS

140

PENYIMPANGAN

PENGENDALIAN RISIKO KORUPSI

"Strategi pengendalian risiko yang bisa dilakukan untuk memitigasi risiko korupsi pada tahapan ini adalah mengembangkan kebijakan pengadaan dan prosedur untuk mencegah korupsi pada tahap perencanaan"

1

"Men-desain"
Pengadaan sesuai
dengan aturan
perundang-undangan



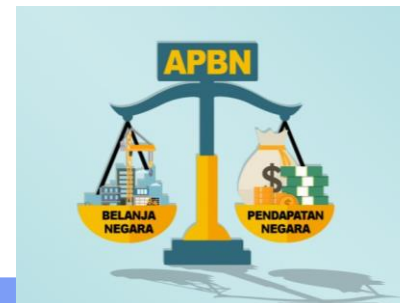
2

Transparansi dalam
Perencanaan



3

Merencanakan Anggaran sesuai
dengan kebutuhan



4

Upaya melalui kebijakan
nasional MCP



PENCEGAHAN KORUPSI PBJP

PENGENDALIAN RISIKO KORUPSI

"Strategi pengendalian risiko yang bisa dilakukan untuk memitigasi risiko korupsi pada tahapan ini adalah melakukan pemanfaatan sistem elektronik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses tender dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan proses pemilihan. "

1

Menggunakan sistem aplikasi dalam pemilihan penyedia.



2

Memanfaatkan e-pengaduan untuk melaporkan pengaduan pengadaan yang tidak sesuai dengan aturan.



PENGADUAN
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

3

Sanksi yang tegas bagi Pelaku Pengadaan yang melakukan kecurangan dalam Proses Pemilihan Penyedia



4

Upaya melalui kebijakan nasional MCP



PENCEGAHAN KORUPSI PBJP



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

1. Yth. Kepala LKPP
2. Yth. Gubernur, Bupati dan Walikota Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI IMPLEMENTASI
E-KATALOG

Pengadaan Barang dan Jasa merupakan salah satu area rawan korupsi, sebagaimana kasus korupsi yang ditangani oleh KPK maupun yang dilaporkan terindikasi korupsi melalui pengaduan masyarakat. Untuk melakukan upaya pencegahan korupsi di area ini, maka pengadaan barang jasa melalui implementasi e-katalog menjadi instrumen untuk pengadaan barang dan jasa yang lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel.



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Yth. 1. Para Menteri;
2. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian;
3. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
6. Para Gubernur; dan
7. Para Bupati/Walikota.

SURAT EDARAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH PADA TAHAP PERENCANAAN DAN PERSIAPAN PENGADAAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan data yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tindak pidana korupsi pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menempati peringkat kedua atas tindak pidana korupsi, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara dan menurunkan kualitas layanan publik.

Mengingat terjadinya tindak pidana korupsi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah besar, maka dibutuhkan pedoman dalam pencegahan korupsi.

Berdasarkan hal di atas, perlu menetapkan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pencegahan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Tahap Perencanaan Dan Persiapan Pengadaan.

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Kolaborasi



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Yth. 1. Para Menteri;
2. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
3. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
6. Para Gubernur; dan
7. Para Bupati/Walikota.

SURAT EDARAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH PADA TAHAP PEMILIHAN PENYEDIA DAN PELAKSANAAN
KONTRAK

1. Latar Belakang

Berdasarkan data yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tindak pidana korupsi pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menempati peringkat kedua atas tindak pidana korupsi, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara dan menurunkan kualitas layanan publik.

Mengingat tingginya tindak pidana korupsi yang terjadi dalam dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka dibutuhkan pedoman dalam pencegahan korupsi.



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Yth. 1. Para Menteri;
2. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian;
3. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
6. Para Gubernur; dan
7. Para Bupati/Walikota.

SURAT EDARAN

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

**PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH PADA TAHAP PERENCANAAN DAN PERSIAPAN PENGADAAN**

SE Nomor 5 Tahun 2024
Pencegahan Korupsi PBJP Tahap
Perencanaan dan Persiapan Pengadaan



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Yth. 1. Para Menteri;
2. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
3. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
6. Para Gubernur; dan
7. Para Bupati/Walikota.

SURAT EDARAN

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

**PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH PADA TAHAP PEMILIHAN PENYEDIA DAN PELAKSANAAN
KONTRAK**

SE Nomor 8 Tahun 2024
Pencegahan Korupsi PBJP Tahap Pemilihan
Penyedia dan Pelaksanaan Kontrak

Upaya Pencegahan Korupsi Tahap Pemilihan Penyedia (*E-Purchasing*)

04

E-purchasing melalui metode Negosiasi Harga, berdasarkan Kepka LKPP 122/2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik

Contoh Pemilihan Produk melalui metode Negosiasi Harga Pik

Nama Penyedia	Produk	Kesesuaian Spesifikasi	PDN	Nilai TKDN	UMKK	Harga Produk	Keterangan
PT. A	Produk A	Ya	Ya	35%	Ya	1000	
PT. B	Produk B	Ya	Ya	45%	Ya	1200	Prioritas Negosiasi
PT. C	Produk C	Ya	Ya	15%	Ya	950	
PT. D	Produk D	Ya	Tidak	-	Ya	925	

Pada Metode negosiasi, untuk paket pengadaan dengan nilai \geq Rp1.000.000.000,00, PPK dapat memperhitungkan Harga Evaluasi Akhir dengan Preferensi Harga

Islam:

Al-Quran:

Surat Al-Baqarah (2): 188: "Dan janganlah kamu memakan harta bendamu sendiri di antara kamu dengan cara yang batil dan janganlah kamu memberikan suap kepada para hakim agar kamu dapat menipu sebagian dari hak orang lain."

Surat An-Nisa (4): 159: "Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat."

Hadits Nabi Muhammad SAW.:

"Terkutuklah orang yang menyuap dan terkutuklah pula orang yang menerima suap." (HR. Abu Dawud)

.



Saatnya kita

"membiasakan yang benar, bukan
membenarkan yang biasa"

Untuk Yang Masih Suka Makan Yang Haram



Dari Ka'ab bin 'Ujrah radhiyallaahu 'anhu :
Bahwa Nabi ﷺ bersabda kepadanya :

"Wahai Ka'ab !
Tidak akan masuk surga orang yang dagingnya tumbuh dari yang haram.
Neraka lebih layak untuknya".

HR Imam Ahmad dalam Musnadnya no 15284.

TERIMA KASIH

Coach Dr Yanuar Wijayanto, M.T. CPEC CT CCMs CPPP CTNLP CH CHt

